

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH (UKM) KOTA PALEMBANG**

(Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)

OLEH :

NAMA : ADE RINGGO WIRANDA

NIM : 20.11.066

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Ade Ringgo Wiranda, 2024, Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Palembang City (Case Study Article 16 Paragraph 1). Palembang State Administration Department. Main supervisor (I) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si and Assistant Supervisor (II) A. Ridhuan Habena, S.I.Kom., M.Si.

MSMEs are business activities carried out by individuals or privately owned business entities with the aim of growing and developing their businesses in order to grow the national economy based on just economic democracy.

This research uses qualitative research, data collection techniques using observation, interviews, documentation and literature study. The findings of this research were in the Department of Cooperatives and SMEs in Palembang City in carrying out six implementation indicators, namely policy standards and targets, resources, communication between organizations and strengthening implementation, characteristics of implementing agents, socio-economic and political conditions, disposition.

Based on the results of research and discussion of researchers' findings in the field regarding the implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) article 16 paragraph 1 in Palembang City, it has been going well, with the support of the Palembang City Cooperatives and SMEs Service for financing. capital, training and the MSME community to increase broad and modern knowledge

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Karakter sosialnya serta Membuat usaha ialah tindakan murni yang dilakukan oleh manusia karena mereka adalah manusia yang saling membutuhkan. Serta tempa berusaha saat serta untuk Indonesiannya, yang sering sebutnya dengan UMKM serta untuk bagiannya pentingnya saat perekonomiannya saat negaranya serta daerahnya.

Pengembangan nasionalnya serta termasuknya untuk komponen kehidupannya bangsanya dibebaskannya serta masyarakatnya atau Pemerintahnya.

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan dalam usaha kecil dan menengah juga pasti akan berhubungan dengan implementasi, implementasi menghubungkan akan tujuannya pemerintahan serta hasil pemerintahan dan Prana Wastra.

mengirimkan pemerintahan serta warganya karenanya pemerintahan serta karenanya hasilnya yang direncanakan termasuk menyiapkan seperangkat regulasinya lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakannya tersebut.

Pada dasarnya, implementasi kebijakannya ialah cara sebuah kebijakannya dapat mencapai tujuannya. untuk menerapkan melalui program atau kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakannya tersebut.

Mengingat Usahanya Mikronya, Kecil atau Menengah serta perannya saat untuk pentingnya saat suatu negara bahkan di suatu daerah dalam penerapan implementasinya dalam mengatur kegiatan program yang berjalan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta berkontribusi untuk pengembangannya UMKM adalah:

1. Pemerintahnya tempat saat bagiannya serta memudahkan usahanya serta bidangnya :
 - a. pengelolaan.
 - b. pengiklanan.
2. 20 Tahun 2008 tentangnya UMKM, pertumbuhan dalam bidangnya manufaktur atau pengawasannya untuk pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu :

a. Memperbaiknya kemampuan manajemen UMKM serta teknik produksi.

Sedangkan Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM), (SDM) dilakukan melalui:

- b. mengubahnya kemampuannya teknologi atau manajerial.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kotapalembang, serta berlokasi di Jalan Merdeka No.6, Palembang, Sumatera Selatan, bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahnya daerah dengan prinsip otonomi atau bantuannya.

Fenomena yang terjadi sejak tahun 2019 Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) Palembang, target serta membina 4.000 selama tahun 2019 serta 2021 belum tercapai. Ada 37.000 UMKM yang tercatat di Kota Palembang dan dari 4.000 bisa tergabung dalam binaan pemerintah kota. Kenyataannya, belum sampai 50 persen masuk program.

Dari temuan atau berita sementara pada tanggal 15 Januari 2024 masih banyaknya permasalahan permodalan, pemasaran dan teknologi yang terjadi dari implementasi tersebut seperti : Masih banyaknya UMKM yang sulit berkembang dan syarat untuk mendapatkan bantuan modal di Kota Palembang sulit, pelaku UMKM yang tidak aktif, beberapa pelaku UMKM yang belum bisa menggunakan teknologi seperti media sosial, Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki modal dalam mengembangkan usahanya, 3 dari 5 anggota UMKM saja yang mempunyai modal yang cukup dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat mempengaruhi dalam proses laporan keuangan yang masih menggunakan sistem manajemen tradisional sehingga kurang menghasilkan jumlah yang akurat.

Berdasarkan sejarah serta pembuat kemukakan serta kehadiran Usaha Mikro Kecil atau Menengah serta konfliknya saat munculnya, saat pembuat menariknya serta menelitinya serta banyaknya mengenai usahanya Mikro Kecil atau Menengah diaturnya serta idenya masalah. serta pembuat tertarik judulnya Proposal Skripsi tentangnya **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)”**

Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya, serta latar belakang ialah: Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkaitnya Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah Kota Palembang (Studi kasus pasal 16 ayat 1)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah: Serta dapatnya Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Usahanya Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi atau Usahanya Kecil atau Menengah Kota Palembang (Studi kasus pasal 16 ayat 1)?

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi ialah tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk kebutuhan apa yang diperlukan, siapa yang melakukannya, kapan dilakukan, dan kapan target implementasi itu sendiri diselesaikan.

Serta Menurut Purwanto atau Sulistyastuti (2012:21), "implementasinya intinya ialah kegiatannya serta mendistribusikannya keluarannya kebijakannya (to deliver policy output) serta dapatnya melalui mereka implementor saatnya kelompoknya tujuannya target group) serta usahanya serta menciptakannya kebijakannya."

Ripley dan Franklin (serta Winarno, 2014: 148) "Implementasi ialah serta berlangsung undang dibuat yang memberikan otoritas kepada program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu keluaran yang nyata. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya serta implementasinya dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah membangunnya koneksi (hubungan) yang memudahkannya tujuannya kebijakan dapat dicapainya sebagai akibat dari tindakan pemerintahnya.

Alfatih (2010:15) menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan tersebut.

Riant Nugroho Dwijiwijoto (dalam Alfatih, 2010:15) menyatakan "implementasi kebijakan ialah serta sebuah kebijakannya mampu mendapatkannya tujuan".

Pendekatan yang disebutkan di atas menempatkan proses di bawah tekanan saat melaksanakan kurikulum. Konsekuensinya, implementasi adalah suatu proses atau aktivitas yang digunakan untuk mengirimkan gagasan, program, atau harapan yang ditulis dalam bentuk kurikulum desain ke dalam tindakan sesuai dengan desain. Masing-masing metode menunjukkan tingkat implementasi yang berbeda.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Menteri, Keputusan

Peradilan, dan Perintah Eksekutif adalah beberapa bentuk kebijaksanaan yang paling umum. Menurut tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan dibatasi oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisinya diatasnya serta dikenalnya apakah implementasinya kebijakannya menyangkut satu item, yaitu:

1. Adanya hasil kegiatan

Diamati hasil lain uraian diatas Ada kemungkinan bahwa implementasi ialah serta dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan atau tindakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan selalu berubah.

Prosesnya implementasinya dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn ialah "Proses implementasinya dirumuskan sebagai pelaksanaan tindakannya atau individunya, pemimpin.

Teori Implementasi

Teori Implementasi seringkali menjadi panduan bagi orang untuk menjalankan implementasi dan para ahli juga mengemukakan teorinya masing-masing dalam penerapan implementasinya seperti:

a. Teori George C. Edwards III (2004)

Serta pandangannya Edwards III, Implementasinya kebijakannya memengaruhinya serta 4 variable, yakni: (1) hubungan, (2) persediaan, (3) kondisi, (4) sistem Birokrasi. 4 variable serta juga saling berhubungan.

- 1) hubungan ialah keberhasilan implementasinya kebijakannya penyelenggara tersebut.
- 2) persediaan ialah tentang implementasinya bukan mungkin kurangnya sumber dayanya.
- 3) Kondisi ialah serta dapat program pembangunan.
- 4) Sistem birokrasi ialah serta mengakibatkannya tindakannya koordinasi tidakfleksibel.

b. Teori Donald S Van Meter dan Carl E. Van Horn

Serta Menurutnya Daniel Van Meter dan Carl Van Horn mengemukakan implementasi yaitu sebuah abstrak implementasinya kebijakannya serta tepat dilaksanakan saat menilai kualitas implementasinya kebijakannya umum saat tingginya serta langsung berhubungan dengan berbeda variabelnya (Agustino, 2012 : 141)

Dalam model ini ada 3 variabelnya serta memiliki dampak kinerjanya implementasinya yaitu :

1. Sarana
2. Situasi sosial, bisnis atau pemerintahan
3. Disposisi

Serta keyakinan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) tindakan hubungan pemerintahan terpengaruh nya satu item terpenting ialah:

- 1) Transmisi ialah komponennya pertama yang mempengaruhinya komunikasi pemerintahan.

Tahapan Implementasi Kebijakan

Serta Tahapannya pelaksanaan pemerintahan saat mempengaruhi berbagai komponen serta rangka pelaksanaannya pemerintahan.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35) bagaimana pemerintahan dilaksanakan ialah :

- a) Tujuan atau pemerintahan.
- b) Sumberdaya pemerintahan.
- c) Aktifitas yang berkaitannya serta pengamatan atau komunikasi

Indikator Implementasi

Dalam melakukan implementasi UU No. 20 Tahun 2008 pasal 16 ayat 1 diharuskan serta simbol saat mengevaluasi tahapannya keberhasilan pengimplementasikan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM tersebut, dimana serta indikator serta dapat digunakan untuk melihat sebagai tolak ukur berhasil atau tidak UU tersebut di implementasikan dalam pengembangan UMKM.

Serta dua indikator saat mengevaluasi kualitas pemerintahan Menurut Daniel Van Meter dan Carl Van Horn mengemukakan pemerintahan yaitu sebuah abstrak pemerintahan aturan serta tepat dilaksanakan serta menilai kualitas pemerintahan aturan publiknya serta tingginya saat langsung berhubungan dengan berbeda variabelnya (Agustino, 2012 : 141) yaitu :

1. Sumber daya
2. Disposisi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang RI No. 20 Tahun 2008 serta UMKM.

Menurut Pasal 1 UU, usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam UU tersebut disebut ialah usahamikro.

Bisnis mikro atau unit bisnisnya memilikinya asset sebesar 50 juta rupiah tidak termasuknya tanah atau bangunan tempat usaha atau hasilnya penjualannya tahunan sebesar 300 juta rupiah.

Usaha mikrokecil dan menengah memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Kemampuan mereka untuk tumbuh secara mandiri

akan menentukan masa depan pembangunan negara.

Secara keseluruhan, atau saran bertujuan untuk mewujudkan Untuk menghadapi persaingan bebas, usaha mikrokecil, atau menengah (UMKM) yang tangguh, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi serta pentingnya.

Istilah "usahakecil atau menengah" atau "UKM" mengacu pada usaha kecil dengan kekayaan bersih paling sedikitnya Rp. 200 juta atau tidak termasuk tanah atau bangunannya yang digunakan melalui bisnis

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM mempunyai kebutuhan yaitu :

- a. Usaha mikro ialah serta kegiatan halnya tradisional.
- b. Usaha kecil ialah serta kegiatan sendiri.
- c. Usaha menengah serta kegiatan halnya perusahaan.

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kelompok usaha yang paling besar dari segi pertumbuhan adalah usaha mikro kecil atau menengah (UMKM).

1. Usaha MikroKecil atau Menengah (UMKM) ialah kerjanya serta mencarinya uangnya.

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Baik di Negara-Negara Sedang Berkembang (NSMB) maupun di Negara-Negara Maju (NM), pertumbuhan atau pembangunan ekonomi bergantung pada usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM).

Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usahakecil serta Indonesianya memiliki banyak kemungkinannya serta berkembang. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seiring perkembangan usaha kecil.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan apakah saat umumnya, sector usahanya memiliki karakteristiknya yaitu:

- a. serta persaingan yang sangat tinggi, margin usaha cenderung tipis.
- b. Jumlah dana sedikit.
- c. Tidak banyak pengalaman managerial dalam pengelolaan perusahaan.

Karakteristiknya mikro usaha menunjukkan bahwa ada kelemahan yang dapat menyebabkan masalah muncul.

Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Bisnis kecil atau menengah (UMKM) serta beberapanya kemampuan kemungkinannya serta dapat sebagainya dasar pertumbuhannya waktu depan ialah:

- a. Memiliki segmen bisnis yang unik dan menerapkan manajemen yang mudah dan adaptif.

Serta Dua komponen terdiri dari kelemahannya, serta seringnya sebagai penghambatnya atau masalah bagi usahamikro:

1. Faktor Internal
Factor internal yang selalu menjadi masalah bagi UMKM ialah:
 - a. Sumber daya manusia masih terbatas.
 - b. Kecenderungan pelanggan yang tidak percaya pada kualitas produk industri kecil
2. Faktor Eksternal
Faktor-faktor serta berasalnya saat pengembangan atau pembinaannya UMKM, serta solusi saat tidak tepat sasarannya, kurangnya pengawasannya, atau program yang tidak terorganisir.

Indikator Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

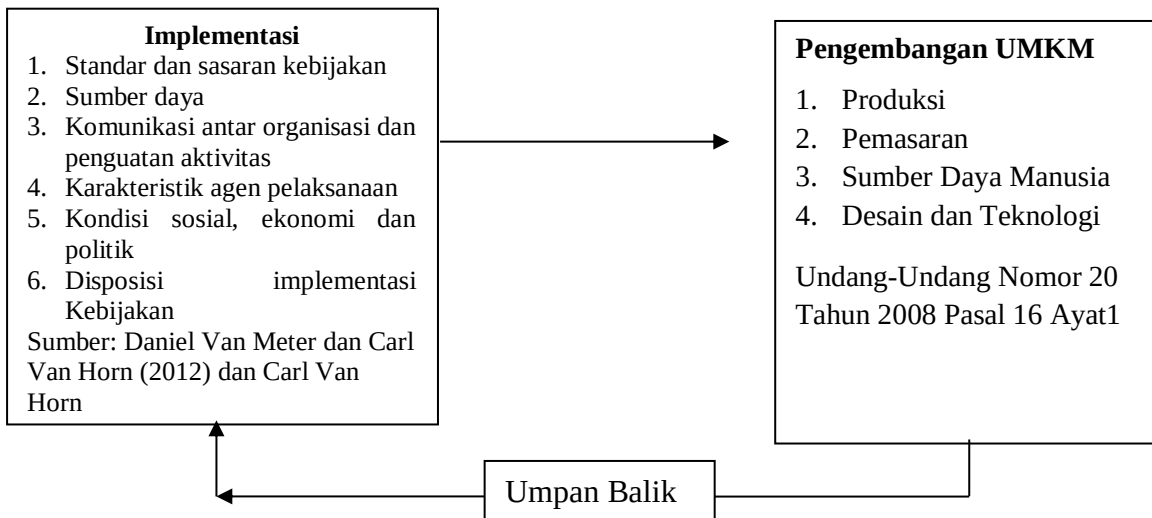
Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bertindak sebagai pengembangannya UMKM ialah:

1. Serta pihak yang memfasilitasi bisnis di bidang ialah:
 - a. pembuatnya
 - b. iklan.
2. Menurut Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangannya serta bidang pembuatnya atau pengelolaannya sebagaimana disebutkan saat ayat (1) huruf a dilakukan secara aktif oleh dunia usaha dan masyarakat:
1. Meningkatkan kemampuan manajemennya UMKM atau tekniknya pengelolaannya atau pembuatnya. Serta Pasalnya 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, (SDM) untuk usaha mikrokecil atau menengah (UMKM) ialah:
2. Memberdayakan atau mempromosikan kewirausahaan.
3. Meningkatkan kemampuan teknisnya dan menejerial.

Kerangka Berpikir

Berikut kerangkanya berpikir serta Implementasinya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha MikroKecil atau Menengah serta began 1 ialah:

Gambar Kerangka Berpikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitiannya ialah serta prosesnya, rangkaiannya langkah serta dilakukannya saat terbukanya atau teraturnya serta mengumpulkan pemecah masalah atau menemukan jawaban terhadap beberapa pertanyaan (Surya brata, 2010: 11). Penulis menggunakan metode penelitiannua deskriptif kualitatif, serta termasuk serta kategori penelitian kualitatif

Menurut Sugiyono (2013:2), Empat katakuncinya serta diperhatikan ialah: metode ilmiahnya, datanya, tujuannya, atau kegunaannya.

Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi serta dipakai serta menggambarkan secara abstrak peristiwa, kondisi sekelompok orang atau individu yang berfokus penelitian ilmu masyarakat atau abstraksi.

1. Implementasi

Serta Daniel A. Mazmania dan Paul Sabatier (1979) mengatakan bahwa implementasi adalah penerapan kebijakan dasar hukum yang juga dapat berupa perintah, keputusan, atau putusan pengadilan.

2. Usaha Mikro Kecil atau Menengah Menurut M. Kwartono, UMKM didefinisikannya ialah kegiatannya ekonomi rakyat atau kekayaan bersih paling tinggi Rp. 200.000.000, tanpanya memperhitungkannya tanah atau bangunan tempat usahanya. Serta UMKM saat didefinisikannya ialah kegiatannya ekonomi rakyat atau omset penjualan tahunan saat banyak Rp. 1.000.000.000 atau milik warga negara Indonesia.

Definisi Operasional

Definisinya Operasionalnya yaitu sebuah sistem serta lengkapnya tentangnya serta yang di amati (Observasi) saat bagaimanaanya mengevaluasi serta variable. yang menjadi definisinya fungsionalnya dan penelitiannya dapatdilihat pada gambar 1 ini:

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi Sumber: Daniel Van Meter dan Carl Van Horn (2012)	1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 4. Karakteristik agen pelaksanaan 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 6. Disposisi
2	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1	1. Produksi 2. Pemasaran 3. Sumber Daya Manusia 4. Desain dan Teknologi

Informan Penelitian

Informasi ialah sumber informasinya serta digunakannya serta penelitiannya ini berjumlah 7 Orang, untuk jelasnya serta dilihat pada tabel ini:

Tabel Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	1
2	Ketua Tim Fasilitasi Usaha Mikro Kecil	1
3	Tim penguatan pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil	1
4	Ketua Tim Pelatihan, Pendampingan SDM Usaha Mikro	1
5	Anggota UMKM	3
	Jumlah	7

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang 2024

Teknik Pengumpulan Data

Serta akan dijelaskan Tekniknya kumpulan datanya serta dipakai melalui peneliti ialah:

Data Primer ialah sumber serta didapatkan langsungnya kepada kumpulan data, (Sugiyono, 2018:213). Datanya melalui serta informan, kemudian akan menjawab pertanyaan sistematis.

1. Observasi ialah melakukannya survei tempatnya penelitiannya.
2. Wawancara ialah melakukan wawancara kepada orang.

Datanya Sekundernya Menurut Sugiyono (2018:213) serta langsungnya kepada kumpul datanya disebut datanya sekundernya, serta bentuknya arsipnya atau serta orangnya.

1. Dokumentasi ialah yang akan di kumpulan foto serta bahan dokumentasi
2. Studi Pustaka ialah serta mencarinya informasinya.

Teknik Analisa Data

Analisa datanya serta dilakukannya secara analisa kualitatif ialah suatu metode yang membahas dengan jalan memaparkan, menafsirkan dan menulis sesuatu keadaan atau peristiwa, kemudian dianalisa serta disimpulkan dalam suatu kesimpulan umum yang dibahas. Tahapan-tahapan analisa data ialah:

1. Pengumpulan Data ialah mencarinya data untuk di kumpulan.
2. Reduktasi Data ialah mencarinya data serta di simpulkan.
3. Penyajian Data ialah mencarinya informasinya serta pembuatan laporannya.
4. Penarikan Kesimpulan ialah kita harus mengerti tahap Teknik Analisa data.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian serta dilaksanakan saat kantor Dinas Koperasi atau Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) Kota Palembang dengan mengadakan Observasi dan wawancara dengan

berhubungan langsung dengan pegawai-pegawai yang kompeten di bidang Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) adalah:

1. Paramiswari, S.STP.,M.Si Selakunya Kepala Bidangnya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
2. Iskandar Zulkarnain, SE Selaku Ketua Tim Fasilitas Usaha Mikro Kecil
3. Andadesu, SE Selaku Tim Penguatan, Pengembangan Dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil
4. Masitho Marwah, SH Ketua Tim Pelatihan, Pendampingan SDM Usaha Mikro
5. Nurul, miranty dan eva selaku anggota UMKM

Serta Menurut penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa indikator yang membantu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang serta mengembangkan usaha mikro kecil atau menengah.

Berikut ini hasilnya diwawancarai serta dilaksanakannya penyelidikan serta narasumber.

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Berdasarkan informasi serta didapat peneliti akan memaparkan hasil wawancara dari informan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang telah di terapkan serta Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang untuk para masyarakat pelaksana Usaha Mikro Kecil atau Menengah. Ada beberapa indikator serta dipakai untuk Mengimplemen-tasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menurut Daniel Van Meter dan Carl Van Horn (2012) yaitu:

- 1) Sumber daya
- 2) Disposisi

Dari indikator tersebut akan dibahas dan diuraikan sesuai wawancara dari informan di Kantor Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang.

- 1) Standar atau sasaran kebijakan

Standar atau tujuan kebijakannya ialah sebagai standar atau tujuan kebijakan, memberikan

perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, sehingga identifikasi indikator hasil kerja sangat penting dalam Analisis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Standar dan sasaran kebijakan di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang serta berjalan dengan bagus.

2) Sumber daya

Sumber daya kebijakan untuk pelaksanaan kebijakan mencakup standar dan tujuan serta penyediaan sumber daya untuk memudahkan administrasi.

Serta hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Sumbernya Daya di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang sudah bekerja baik.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Serta implementasinya aktifitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional (inter-organisational communication and enforcement activities) yang efektif, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program harus memahami standar dan tujuan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk biaya dan fasilitas di Dinas Koperasi atau Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) Kota Palembang serta berjalan dengan bagus.

4) Karakteristik agen pelaksanaan

Karakteristik pelaksanaan Struktur borokrasi dianggap sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan eksekutif yang terkait dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan. Lebih khusus lagi, struktur borokrasi berkaitan dengan kemampuan dan standar staf di tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan subunit dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Karakteristik agen pelaksanaan di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang serta berjalan dengan bagus.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak terpengaruh oleh pengaruh ekonomi, sosial, dan politik (eksospol). Namun, pengaruh eksospol

terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Kondisi sosial, ekonomi dan politik di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang sudah serta dirasakan seperti kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial .

6) Disposisi

Faktor disposisi atau sikap pelaksanaan ini berkaitan dengan persepsi pelaksana dalam yurisdiksi tempat kebijakan diberikan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi melalui dua komponen:

1. Metode yang digunakan pelaksana untuk menanggapi implementasi menerima atau menolak.

2. Intensitas telepon serta pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Penanganan Disposisi di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang serta dilakukan dengan penuh komitmen serta kejujuran yaitu baik dalam penyaluran dana dan pelaksanaannya seperti setidaknya, hingga Senin (29/04/2024) sudah sebanyak 17.916 UMKM yang mengajukan usahanya ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang.untuk menerima bantuan.

B. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM adalah salah satu konsep yang di pakai oleh penulis dalam menentukan definisi konsep penelitian, berdasarkan informasi yang didapat peneliti akan memaparkan hasil wawancara dari informan mengenai pertumbuhan UMKM serta Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diterapkan oleh Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang serta para masyarakat Mikro Kecil dan Menengah. Ada beberapa indikator yang dipakai dalam mengembangkan UMKM dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1 yaitu:

- 1) Produksi
- 2) Pemasarannya
- 3) Sumbernya Daya Manusia
- 4) Desainnya atau Teknologi

Dari indikator tersebut akan dibahas dan diuraikan sesuai wawancara dari informan di

Kantor Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang.

1) Produksi

Produksi adalah suatu seperti produksi kemplang kini menjadi penganan lokal yang ikonik karena dikembangkan secara turun-temurun. Selain itu penganan tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi kelompok perempuan (ibu rumah tangga) di Lorong Mari, Kelurahan Talang bubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Serta hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Produksi di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang serta dirasakan dampaknya dengan bagus melalui pelaku UMKM namun masih perlu penambahan modal agar agar proses produksinya terus bertahan.

2) Pemasarannya

Pemasarannya ialah bisnis, kumpulan organisasi, dan proses yang digunakan untuk

membuat, berkomunikasi, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang berharga bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum.

Serta hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator Bukti Langsung di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang serta memasarkan hasil produksinya melalui pembukaan kios atau bekerjasama dengan toko-toko bahkan di mini market, Serta pemanfaatan media sosial.”

3) Sumbernya Daya Manusia

Sumbernya daya manusia (SDM) ialah serta komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi; baik institusi maupun perusahaan, SDM juga berperan penting dalam menentukan perkembangan bisnis.

Adapun sumber daya manusianya serta Dinas Koperasi atau Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) Kota Palembang Sebagai Berikut :

Tabel Sumber Daya Mnausia

No.	Sub SKPD	JUMLAH		TINGKAT PENDIDIKAN						
		PNS	Non PNS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretaris	19	8	1	-	6	1	15	3	1
3.	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	7	-	-	-	-	-	3	4	-
4.	Bidang Pemberdayaan Koperasi	8	-	-	-	-	-	4	4	-
5.	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	8	1	-	-	1	-	4	4	-
6.	Bidang Kewirausahaan	9	1	-	-	2	-	5	3	-
	Jumlah	52	10							

Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang tahun 2024

Serta hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator sumbernya daya manusia di Dinas Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palembang sangatlah penting.

4) Desainnya dan Teknologi

Desainnya atau Teknologi ialah serta berkaitan dengan bagaimana membuat, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat untuk membantu siswa belajar dan meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 04 April dengan Iskandar Zulkarnain selaku Ketua Tim Fasilitasi Usaha Mikro Kecil serta Dinas Koperasi atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa serta hasilnya diwawancarai dengan serta informan

didas penulis serta menyimpulkan untuk indikator Desain dan Teknologi di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota.

Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Berdasarkan serta di dapat penelitian bahwa implementasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 16 ayat 1 telah di terapkan oleh Dinas Koperasi atau UKM kota Palembang dengan proses sebagaimana mestinya atau menggunakan berbagai macam pendekatan-pendekatan terhadap konsep dan indikator.

Adapun program Dinas Koperasi atau UKM kota Palembang serta gunakan guna mendukung pemberdayaan UMKM di salah satunya adalah

program kredit UKM, Tujuan dari program serta dirancang oleh Walikota dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang ialah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, terutama di bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Adapun peran Dinas Koperasi atau UKM Kota Palembang dalam upaya serta sumberdaya yakni dengan pelatihan bidang UMKM seperti sosialisasi mekanisme sertifikasi halal, Bimbingan teknis branding dan packaging, Bimbingan teknis digital marketing tingkat dasar (Basic), pelatihan digital marketing tingkat lanjutan (*Advanced*), sosialisasi rekomendasi harta kekayaan intelektual dan sosialisasi program akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan diadakanya beberapa pelatihan-pelatihan di harapkan dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan UMKM guna menjadikan UMKM yang modern.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Meskipun serta berbagai keunggulan, UMKM juga menghadapi permasalahan. Pada dasarnya permasalahan secara umum yang dihadapi oleh UMKM dapat disederhanakan menjadi 2 kelompok yaitu, rendahnya kemampuan pengelola usaha, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif. Masalah SDM merupakan critical faktor yang paling menentukan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai kegiatan atau usaha, baik UMKM maupun usaha besar. Kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dalam sektor usaha tersebut.

Permasalahan kedua yaitu adanya ketersediaan yang terbatas kepada sumbernya daya aktif, serta pemasaran, teknologi. Beberapa komponen serta masalahnya iklan ialah tingkat serta yang keras bagus dipasar domestiknya maupun di pasar ekspor. Sementara itu, seperti yang telah diuraikan pada umumnya kualitas produk dan tingkat produktivitas UMKM di Indonesia rendah, ditambah dengan iklim usaha yang belum kondusif di dalam negeri, yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi, seperti pengurusan perizinan yang mahal, dengan prosedur yang panjang, serta banyaknya biaya pungutan tidak resmi turut memperlemah daya saing produk-produk UMKM.

Perkembangan yang paling sering dialami yakni masalah struktural dan kultural. Aspek struktural seperti akses modal, pelatihan, training dan pasar. Aspek kultural yaitu cara berpikir dan mentalitas.

Menurutnya kualitas para pengusaha di Indonesia sangat hebat, namun kurang memiliki akses yang baik. Sedangkan terhadap kultural, bekerja keras, berani mencoba dan saling berkolaborasi sangat penting bagi seorang wirausaha khususnya wirausaha muda.

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM, disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman dalam sektor usaha tertentu serta terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif karena adanya keterbatasan akses terutama pemasaran, permodalan, dan teknologi.

Solusi untuk meningkatkan pengembangan UMKM yang diterapkan oleh dinas Koperasi atau Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palembang ialah :

1. Mendorong agar pelatihan-pelatihan diberikan kepada UMKM untuk mencapaisasaran.
2. Dibutuhkan persiapan perencanaan yang baik dengan memenuhi kebutuhan materi pelatihan lebih dahulu.
3. Melakukan monitoring dan tindak lanjut pasca pelatihan untuk melihat perkembangan pelatihan tersebut dalam pengelolaan.

Serta hasilnya penelitiannya dan pembahasan serta dapat di simpulkan serta dari sisi Implementasi Undang-Undang nomor nomor 20 tahun 2008 pasal 16 ayat 1 Dinas Koperasi atau UKM Kota Palembang melakukan berbagai pendekatan terhadap konsep dan indikator yang ada sudah berjalan. Dalam proses pemberdayaan UMKM sendiri Dinas Koperasi atau UKM Kota Palembang menerapkan berbagai dalam pengembangan sumberdaya diadakanya berbagai pelatihan dan sosialisasi serta pegelompokan komoditi sektor UMKM guna meningkatkan kualitas dan desain teknologi yang lebih maju dan modern.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Serta hasilnya penelitiannya atau diskusi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Usaha Mikro Kecil atau Menengah di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, implementasi undang-undang tersebut bagus.

Saran

Serta simpulan saat dijelaskan, serta penulisnya berbagi sarannya ialah: Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi atau Usaha Kecil atau Menengah (UKM) Kota Palembang dan serta indikator serta sudah berjalan bagus ini agar dapat dipertahankan dan untuk indikator yang menjadi penghambat agar dapat diminimalisi.

DAFTAR FUSTAKA

- Adi, M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, yogyakarta
- Dani Danuar Tri U. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang: Diponegoro Journal Of Economics Volume 2*, Universitas Diponegoro Semarang
- Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier. 1979. *Dalam Buku Solihin Abdul Wahab (2008:65)*
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Edwards III, George C. 2003, *Implementing Public Policy*, Jakarta
- Naila Rizkia 2018. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Sudirman.2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Supardi DKK. *Pedoman penyusunan skripsi 2023*. STIA Satya Negara Palembang
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Dokumen-dokumen :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 19
- Data UMKM Kota Palembang Per-kecamatan Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang
- Sumber internet :**
- Si musi Palembang. 2024. Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang
- <https://diskopukm.palembang.go.id/> diakses 04 Febuari 2024